

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi positif selama satu dekade terakhir, namun jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan belum berkurang secara signifikan. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dan data Bank Dunia (World Bank), Indonesia adalah salah satu dari 5 negara Muslim termiskin di dunia. Jika data versi BPS menyebutkan, jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 29,88 juta (11.66 %) dari total penduduk dengan pendapatan Rp 259,520 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik, 2013). Bahkan dengan menggunakan standar kemiskinan Bank Dunia yaitu \$2 per hari, diperkirakan lebih dari 50% atau 100 juta penduduk Indonesia menyanggah status "miskin"<sup>1</sup>.

Sementara itu, berdasarkan rasio Gini, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat ternyata mengalami peningkatan, terutama sejak pasca krisis ekonomi 1998. Rasio Gini pada tahun 1999 mencapai angka 0,311, sedangkan pada tahun 2008 angka tersebut menjadi 0,368. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kue pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kelompok menengah ke bawah. Meski demikian, kisaran angka indeks Gini ini masih berada pada kategori *low income gap* menurut versi Bank Dunia<sup>2</sup>.

Menyadari penting dan eratnya hubungan pemerataan distribusi pendapatan dengan pengentasan kemiskinan, Islam telah memiliki instrumen tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang dianggap mampu menurut kriteria Islam untuk mengeluarkan antara 2,5%-20% dari proporsi hartanya untuk disalurkan kepada yang berkekurangan secara finansial.

Saat ini zakat semakin berperan menjadi salah satu instrumen dalam

---

<sup>1</sup> Firmansyah, Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan. (*Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 21, No. 2, Desember 2013*), 181.

<sup>2</sup> Firmansyah, Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan. 182.

pembangunan manusia, khususnya di Indonesia. Konsep zakat sebagaimana yang dikatakan Beik, pada dasarnya memiliki tiga dimensi pokok, yaitu dimensi spiritual personal, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Zakat merupakan sarana ibadah dan penyucian jiwa seseorang. Dengan berzakat produktivitas individual akan meningkat, karena zakat mendorong seseorang untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Dalam dimensi ekonomi, Beik lebih lanjut menjelaskan bahwa zakat memiliki dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian. Jika dikaji lebih mendalam, ketiga dimensi di atas memiliki hubungan positif dengan parameter pembangunan manusia yang terdiri atas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak<sup>3</sup>.

Di sisi lain, zakat juga memiliki korelasi dengan variabel pertumbuhan ekonomi. Pramanik menyatakan bahwa zakat berpengaruh pada investasi dan produksi, saving, dan konsumsi. Pada sisi investasi, zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana produktif bagi pengembangan usaha mikro penerima zakat (mustahik). Pengembangan usaha mikro ini bisa membantu perekonomian Indonesia dan relatif memiliki daya tahan lebih besar dalam situasi krisis ekonomi. Pada sisi konsumsi, pemberian zakat dapat menstimulus peningkatan *aggregate demand* (permintaan agregat). Kenaikan permintaan agregat akan mendorong peningkatan dari sisi *supply*, sehingga perekonomian akan semakin berkembang. Namun, efektivitas penggunaan zakat sebagai instrumen peningkatan pembangunan akan dipengaruhi oleh aspek kinerja lembaga-lembaga zakat dan potensi dana zakat itu sendiri<sup>4</sup>.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi zakat yang cukup besar. Berdasarkan studi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Institut Pertanian Bogor dan *Islamic Development Bank* pada tahun 2011, potensi zakat nasional mencapai angka Rp 217.3 triliun per tahun. Meskipun realisasi zakat masih dibawah satu persen dari proyeksi, namun pertumbuhan zakat nasional terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. BAZNAS (2013)

---

<sup>3</sup> Rina Murniati<sup>1</sup> dan Irfan Syauqi Beik, Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor. (*Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 2, No. 2. ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363), 135.

<sup>4</sup> Pramanik AH. *Development and Distribution in Islam*. (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1993), 76.

mencatat untuk tahun 2012, dana zakat yang berhasil dihimpun mencapai Rp 2.2 triliun, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.7 triliun dan tahun 2010 sebesar Rp 1.5 triliun dan mengalami tren kenaikan hingga di tahun 2019. Jika dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan yaitu sekitar Rp 70 triliun setiap tahun, maka zakat dapat membantu setidaknya 1.7 juta mustahik yang setara dengan enam persen warga miskin.

Pola penanganan dan pengelolaan zakat juga harus mulai diubah, jika sebelumnya hanya didekati dalam platform hukum-hukum agama, maka ke depan harus didekati juga dalam instrumen manajemen keuangan dan kebijakan ekonomi. Sebagai sebuah kewajiban masyarakat, maka zakat adalah instrumen fiskal, akan tetapi dalam lingkup pemanfaatan dan pendayagunaan, maka zakat adalah instrumen moneter dan instrumen sosial. Sehingga tidak salah jika penataan dan pengelolaan zakat juga dikaitkan dengan kebijakan pembangunan di Indonesia.

Pada sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. Secara menyeluruh, hal ini dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa kepada peluang, stabilitas dan pemerataan ekonomi yang lebih besar<sup>5</sup>. Satu fakta yang tak terbantahkan pertumbuhan perekonomian dunia selama dua abad ini telah menimbulkan dua efek yang sangat penting, yaitu : pertama, semakin meningkatnya kemakmuran atau taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat dunia, kedua, terbukanya kesempatan kerja baru bagi penduduk yang semakin bertambah jumlahnya.

Meskipun demikian, ditengah pesatnya perkembangan dalam bidang industri, sains, dan revolusi teknologi, di negara-negara maju kemiskinan absolut dan sejumlah permasalahan ekonomi lainnya masih terjadi. Sedangkan di negara berkembang<sup>6</sup>, kondisinya lebih parah lagi. Sampai saat ini, kesenjangan

---

<sup>5</sup> Syed Nawab Haidar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 133

<sup>6</sup> Negara berkembang memiliki karakteristik antara lain, taraf hidup yang rendah, produktifitas yang rendah, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan ketergantungan pada

pendapatan, pengangguran, kekurangan pangan dan beragam kesengsaraan hidup masih mewarnai sebagian besar penduduk dunia.<sup>7</sup> Dan kondisi ini diperparah lagi dengan terjadinya krisis keuangan global yang memperburuk kondisi ekonomi di berbagai negara.

Terjadinya krisis ekonomi dalam perspektif Islam tentu saja tidak terlepas dari praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti perilaku riba (dalam makna yang luas), monopoli, korupsi, dan tindakan malpraktek lainnya. Bila pelaku ekonomi telah terbiasa bertindak di luar tuntunan ekonomi Ilahiah, maka tidaklah berlebihan bila krisis ekonomi yang melanda kita adalah suatu malapetaka yang sengaja diundang kehadirannya akibat ulah tangan manusia sendiri.

Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)

Krisis ekonomi – dalam analisis Chapra – telah memperlihatkan secara jelas kelemahan logika Hukum Say dan konsep laissez faire. Ini dibuktikan oleh ekonomi pasar yang hampir tidak mampu secara konstan menggapai tingkat full employment dan kemakmuran. Ironisnya, di balik kemajuan ilmu ekonomi yang begitu pesat, penuh inovasi, dilengkapi dengan metodologi yang semakin tajam, model-model matematika dan ekonometri yang semakin luas untuk melakukan evaluasi dan prediksi, ternyata ilmu ekonomi tetap memiliki keterbatasan untuk menggambarkan, menganalisa maupun memproyeksikan kecenderungan tingkah laku ekonomi dalam perspektif waktu jangka pendek<sup>8</sup>

---

ekspor hasil-hasil pertanian. Lihat Ace Pertadireja, Pengantar Ekonomika (Yogyakarta: BPFE, 1984), 213–219

<sup>7</sup> Safiq A. Alvi dan Amer Al-Raubae, “Strategi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan dalam Persepsi Islam,” *Jurnal Islamia* II, no. 5 (2005): 87

<sup>8</sup> M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1998), 80

Dengan kata lain, ilmu ekonomi, bekerja dengan asumsi-asumsi *ceteris paribus*. Dalam konteks ini, Keynes<sup>9</sup> pernah mengatakan, “Kita terkungkung dan kehabisan energi dalam perangkat teori dan implementasi ilmu ekonomi kapitalis yang ternyata tetap saja mandul untuk melakukan terobosan mendasar guna mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia di muka bumi ini”<sup>10</sup>.

Melihat fakta di atas, jelas bahwa sistem ekonomi konvensional hari ini menghadapi masa krisis dan re-evaluasi. Ia menghadapi serangan dari berbagai penjuru. Banyak ekonom dan perencana pembangunan yang skeptis tentang pendekatan utuh ilmu ekonomi pembangunan kontemporer. Menurut Kursyid Ahmad, sebagian mereka berpendapat bahwa teori yang didapat dari pengalaman pembangunan Barat kemudian diterapkan di negara-negara berkembang, jelas tidak sesuai dan merusak masa depan pembangunan itu sendiri<sup>11</sup>.

Pada akhirnya, kita memerlukan suatu konsep pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mampu merealisasikan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam suatu pembangunan ekonomi secara tepat, teruji dan bisa diterapkan oleh semua negara-negara di belahan bumi ini, tetapi juga yang terpenting adalah kemampuan konsep tersebut meminimalisasi atau bahkan menghilangkan segala *negative effect* pembangunan yang dilakukan. Konsep tersebut juga harus mampu memperhatikan sisi kemanusiaan tanpa melupakan aspek moral.

Diantara strategi yang diambil untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi adalah penetapan kebijakan inflasi. Secara umum, kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian dibidang penerimaan dan Kebijakan Fiskal untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk

---

<sup>9</sup> Keynes adalah ekonom terkemuka dari Universitas Cambridge. Ia dianggap sebagai ekonom yang mampu melahirkan pikiran-pikiran baru yang tidak dicetuskan oleh pendahulunya sehingga membentuk aliran ekonomi tersendiri yakni Keynesian. Saat itu ada dua permasalahan yang muncul setelah depresi yang dialami oleh Amerika Serikat, yaitu teori tentang uang dan apa yang harus diusahakan oleh negara untuk mengurangi pengangguran. Keynes dianggap memiliki ulasan teoritis yang paling sistimatis dan komprehensif. Lihat George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka* (Jakarta: Kanisius, 1994), 156

<sup>10</sup> Chapra, *Islam and The Economic Challen*,.....81

<sup>11</sup> Kursyid Ahmad, “*Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*,” *Etika Ekonomi Politik* (Jakarta: Risalah Gusti, 1997), 9.

menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan Kebijakan Fiskal<sup>12</sup>.

Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai “*politik fiskal*” bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian<sup>13</sup>. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja negara.

Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam lebih memegang peranan penting bila dibandingkan kebijakan moneter. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban mengeluarkan zakat dan larangan riba, yang menyiratkan bahwa kedudukan kebijakan fiskal lebih penting dibandingkan dengan kebijakan moneter<sup>14</sup>.

Meskipun demikian, kebijakan fiskal merupakan salah satu dari piranti kebijakan ekonomi makro<sup>15</sup>. Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh penerimaan dan Kebijakan Fiskal sehingga menimbulkan gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah penerimaan dan Kebijakan Fiskal guna memperbaiki kestabilan ekonomi. Teknik mengubah penerimaan dan pengeluaran inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal<sup>16</sup>.

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut<sup>17</sup>. Pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan

---

<sup>12</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 1.

<sup>13</sup> Reksoprayitno, Soediyono. *Ekonomi Makro, Pengantar Analisis Pendapatan Nasional* (Yogyakarta: Liberty, 1992), 95

<sup>14</sup> Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 144.

<sup>15</sup> M. Faried Wijaya, *Ekonomi Makro* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 5-7.

<sup>16</sup> M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 256.

<sup>17</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salembat Empat, 2002), 197-198.

maksimum bagi individu di dunia ini. Namun dalam Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan dunia dan akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.

Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melayani umat. kemudian dilihat dari berbagai fakta permasalahan secara mendalam terungkap bahwa permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa ditengah-tengah masyarakat sehingga titik berat permasalahan ekonomi bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil<sup>18</sup>.

Kebijakan tentang zakat dan pajak misalnya, akan dipengaruhi pula oleh kebijakan umum pemerintah tentang pendapatan negara. Kebijakan tentang pendapatan negara akan dipengaruhi pula oleh kebijakan fiskal yang diambil suatu negara melalui menteri keuangan.

Sistem ekonomi Islam telah ada sejak adanya manusia itu sendiri. Oleh karenanya, teori bagaimana memperoleh pendapatan telah diajarkan oleh Allah Swt sejak turunnya wahyu Allah Swt yang menciptakan manusia sekaligus menurunkan pula petunjuk termasuk bagaimana cara-cara memperoleh pendapatan dan juga caracara membelanjakan pendapatan itu<sup>19</sup>.

Islam telah lengkap dan sempurna, sebagaimana firman-Nya (Q.S. Al-Maidah (5) : 3):

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا

...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuidhai Islam itu jadi agama bagimu.

Ayat tersebut menerangkan bahwa Islam adalah agama yang lengkap termasuk didalamnya memberikan tuntunan dalam perekonomian. Sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaurrasyidin sudah begitu jelas dan banyak yang

<sup>18</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, sistem dan Aspek Hukum* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 193-194

<sup>19</sup> Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007) 145.

mencontohkan bagaimana cara negara memperoleh pendapatan.

Mengenai pendapatan negara, Allah Swt telah menggariskan beberapa sumber primer yang boleh dipungut oleh pemerintah, misalnya: Zakat, jizyah, fa'i, ghanimah, kharaj disamping pendapatan lain (sekunder), yang merupakan ijtihad para khalifah, berupa denda atau sitaan sebagai sanksi-sanksi atas pelanggaran hukum, seperti korupsi<sup>20</sup>

Kewajiban negara atas rakyatnya adalah melayani dan mengurus urusan umat. Salah satu urusan umat yang wajib dilaksanakan oleh negara (Daulah Islamiyah) adalah mengatur ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga pada akhirnya negara menjadi kuat. Bentuk kewajiban negara atas masalah ini diatur melalui institusi Baitul Mal, disamping penegakkan syariat lainnya oleh negara seperti syariat yang mengatur mekanisme dan transaksi ekonomi (caracara memperoleh harta dan mengembangkannya atau investasi, membelanjakan harta atau konsumsi), penerapan sanksi (uqubat) atas pelanggaran hukum, dan menegakkan keamanan yang akan mengayomi aktivitas ekonomi masyarakat sehingga kegiatan ekonomi menjadi lancar.

Baitul Mal merupakan suatu institusi khusus di bawah Khalifah yang mengatur sumber-sumber pemasukan harta (pendapatan) negara baik dari sumber-sumber pemasukan tetap (rutin) maupun yang bersifat temporal. Kemudian mengalokasikannya sebagai pengeluaran yang bersifat rutin maupun temporal. Harta yang dikumpulkan Khalifah dan para walinya di dalam Baitul Mal menjadi hak kaum Muslimin dan syara' mewajibkan negara membelanjakannya secara syar'i untuk membayar jasa yang diberikan individu kepada negara, mengatasi kemiskinan dan kelaparan, tunjangan dan penyediaan lapangan kerja, modal usaha bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur dan pelayan publik, dan lain-lainnya.

Kebijakan Khalifah atas Baitul Mal baik dari sisi pemasukan maupun belanja negara yang ditentukan secara syar'i, merupakan bagian dari penerapan syariat Islam sehingga tujuan-tujuan Baitul Mal adalah juga tujuan-tujuan syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan Baitul Mal terhadap pemasukan dan pengeluaran negara harus selaras dengan menyelamatkan rakyat (Muslim

---

<sup>20</sup> Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007) 146.

maupun non-Muslim) dari yang menyebabkan kesengsaraan seperti kemiskinan, hutang yang tidak dapat dibayar, kelaparan, pengangguran, bencana alam, kebodohan, gejolak harga (inflasi maupun deflasi) karena ketidakseimbangan pasar, yang secara umum dapat dikatakan sebagai kebijakan untuk mengeluarkan negara dan masyarakat dari resesi ataupun depresi ekonomi. Juga kebijakan atas Baitul Mal bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan bagi setiap rakyatnya dengan melakukan suatu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan baik dari sisi kesadaran ruhiyah antara lain melalui pendidikan, maupun dari sisi kemampuan dan kekayaan materi dengan mengupayakan suatu perekonomian yang tumbuh, bahkan tumbuh pesat (booming), tanpa mengabaikan mekanisme distribusi ekonomi yang adil.

Tujuan-tujuan dari kebijakan pengelolaan harta negara tersebut, sudah dilakukan oleh *Daulah Islamiyah* yakni sejak Rasulullah bersama para sahabat mendirikan negara Islam (Islamic State) di Madinah, dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, para Khalifah di masa Khilafah Umayyah, Khilafah Abasiyyah, hingga Khilafah Usmaniyyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Harun Al-Rasyid merupakan contoh dari pemimpin Islam yang telah berhasil membuktikan betapa efektifnya instrumen ini dalam pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Abu Yusuf dengan mengedepankan konsep keseimbangan yang berlandaskan etika dan moral agama. Diharapkan dari teori Abu Yusuf ini dapat menyelesaikan segala bentuk negatif tatanan kehidupan perekonomian yang melanda semua negara di dunia, atau setidaknya dari teori ini dapat ditawarkan bentuk jalan keluarnya. Dengan kitabnya al-Kharaj yang banyak mengupas kajian dalam bidang *public finance* yang erat kaitannya dengan kebijakan fiskal. Dalam kitabnya ia berbicara masalah pajak proporsional atas hasil pertanian dari tanah Kharaj, sektor pembelanjaan ia lebih menekankan akan pentingnya pembangunan infrastruktur yang diperlukan masyarakat, seperti irigasi, jembatan dan lainnya. (Abû Yûsuf, Kitab Al-Kharrâj li al-Qâdli Abû Yûsuf Ya'qûb ibn Ibrâhîm Shâhib al-Imâm Abî Hanîfah).

Secara umum fungsi kebijakan fiskal adalah fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi perekonomian. Dalam hal alokasi, maka digunakan untuk apa sajakah

sumber-sumber keuangan negara, sedangkan distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di masyarakat, dan stabilisasi adalah bagaimana negara menciptakan perekonomian yang stabil.

Dalam Sistem Ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Juga mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi.

Di era globalisasi ini yang sering disebut era modernisasi ini sangat diperlukan Sumberdaya manusia yang sangat memadai untuk perkembangan dikalangan masyarakat Indonesia yang masih jauh dari harapan pemerintah sebagai pengatur tatanan pemerintah maupun tatanan masyarakatnya yang bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Standar pembangunan manusia yang menjadi kesepakatan antara lain berhak untuk bisa membaca dan menulis, untuk hidup sehat, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak, untuk mendapat rumah yang memadai, dan untuk hidup sebagai satu bangsa dengan damai dan aman. Diharapkan dengan desentralisasi atau yang lebih populer disebut otonomi daerah dapat memotivasi daerah-daerah tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk lebih memprioritaskan mengurangi kemiskinan dan mempersiapkan diri dalam sumberdaya manusia yang handal.

Paradigma pembangunan manusia melihat bahwa usaha peningkatan kualitas manusia memiliki nilai intrinsik, dalam arti, sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Prespektif ini berbeda dengan pembangunan sumberdaya manusia, yang menempatkan manusia sebagai sumber atau input pembangunan dan melihat kualitas manusia sebagai sarana (means) untuk menghasilkan pendapatan. Sebagai paradigma pembangunan yang holistik, pembangunan manusia memandang program pembangunan yang dirancang, seharusnya bercirikan "*of, for and by*

*people*”. Maksud dari ciri-ciri ini adalah sebagai berikut: Pertama, tentang penduduk (*of people*), yakni pemberdayaan penduduk yang diupayakan melalui investasi bidangbidang pendidikan kesehatan, dan pelayanan sosial dasar lainnya: Kedua, untuk penduduk (*for people*), yakni pemberdayaan penduduk yang diupayakan melalui penciptaan peluang kerja dan perluasan peluang berusaha (dengan cara memperluas kegiatan ekonomi suatu wilayah): Ketiga, oleh penduduk (*by people*), yakni pemberdayaan penduduk yang dapat meningkatkan harkat dan martabat melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan di segala bidang. Dalam hal ini berarti menyangkut pengambilan keputusan dalam proses pembangunan<sup>21</sup>.

Keberhasilan masa depan suatu daerah di era globalisasi terletak pada pengelolaan produktifitas, pengusahaan perubahan-perubahan dan pengelolaan pembangunan kerja secara cepat. Masyarakat kita tergantung pada spesialisasi dari berbagai spesifik untuk menyediakan output dan input yang dihasilkan maupun yang didapat supaya menghindari pengangguran berstruktur, sehingga menaikkan kualitas taraf hidup subjek atau masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran disuatu daerah. Demi mencapai kehidupan yang lebih baik diperlukan proses sosial antara pemerintah dan masyarakatnya demi mencapai keselarasan dan keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah maupun tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Apapun komponen spesifik atas kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu peningkatan ketersediaan kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan ekonomis dan sosial setiap individu. Adanya kemiskinan di dalam suatu wilayah merupakan potret bahwa pembangunan itu secara umum kurang berhasil sehingga pada dasarnya keberhasilan pembangunan suatu wilayah tergantung pada kegiatan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Globalisasi selalu berkaitan dengan perekonomian yang melibatkan hubungan-hubungan global. Sesungguhnya globalisasi bukan hanya sebatas tentang kesalingtergantungan terhadap ekonomi saja, akan tetapi

---

<sup>21</sup> Badruddin, Syamsiah. *Teori dan Indikator Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), 45-50.

terletak pada persoalan transformasi waktu dan ruang dalam kehidupan manusia. Globalisasi dapat mempengaruhi masyarakat secara langsung dan segera dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari jasa revolusi komunikasi dan peyebaran teknologi informasi yang semakin cepat, canggih dan modern<sup>22</sup>.

Indeks pembangunan manusia merupakan cara sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup<sup>23</sup>. Pembangunan manusia, dalam terminologi pembangunan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan maupun retorika politik pembangunan, hal tersebut sering dijumpai dalam berbagai kesempatan. Namun demikian, selama enam repelita, pembangunan manusia kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Kini, setelah derasnya arus reformasi dan tuntutan krisis tak lagi dapat terbendung, banyak orang kembali mengangkat isu tentang hakekat pembangunan yang selama ini dilaksanakan, yang konon tidak terpusat pada manusia sebagaimana dikehendaki oleh paradigma baru pembangunan manusia.

Globalisasi menuntut adanya persaingan yang sangat ketat di berbagai setiap bidangnya dan persaingan itu tidak lepas dari semua unsur kebutuhan umat manusia yang terus maju serta berkembang. Sehingga perlu adanya upaya reformasi untuk melakukan sebuah perubahan yang dapat menjawab segala tantangan di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dan hal utama untuk melakukan perubahan, tentu ini menjadi persoalan bagi ajaran Islam yang juga memandangnya. Pembangunan manusia tidak hanya merupakan tugas pemerintah, institusi pendidikan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, namun Islam juga memandang dengan perspektif sekaligus pendekatan nilai normatif dan historis untuk menginterpretasikannya. Perlu adanya penafsiran kontekstual untuk memahami adanya strategi dan upaya pembangunan manusia di

---

<sup>22</sup> Anthony Giddens, *The Third Way, Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 35.

<sup>23</sup> Davies, A. and G. Quinlivan, *A Panel Data Analysis of the Impact of Trade on Human Development*, (Journal of Socioeconomics, 2006), 25.

era globalisasi, dan sebagai bentuk modernasi ummat Islam dalam menyikapi persoalan pembangunan manusia tersebut.

Pembangunan manusia, menurut UNDP, didefinisikan sebagai suatu proses yang ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (*people*). Dalam konsep ini, penduduk (manusia) sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) dan upaya pembangunan itu sendiri sebagai sarana utama (*principle means*) dalam rangka mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, empat hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Keempat hal ini, saling terkait, dan menjadi penentu dalam perumusan kebijakan pembangunan manusia (dalam arti yang luas). Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih luas dibandingkan dengan teoriteori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumberdaya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (*beneficiaries*) bukan sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup<sup>24</sup>.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Menurut Siagian, ia memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan

---

<sup>24</sup> T, Moeljarto, *Politik Pembangunan (Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi)*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995), 15-23

menurut Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan atau perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat<sup>25</sup>.

Sementara itu, terdapat referensi lain yang menggagas konsep dan indeks pembangunan manusia dari perspektif berbeda. Salah satunya dikemukakan oleh Stiglitz, Sen, dan Fitoussi, yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan kesehatan, pendidikan, keamanan dari segi ekonomi, keseimbangan waktu, partisipasi politik dan pemerintahan, hubungan sosial, kondisi lingkungan, keamanan pribadi, dan tingkat kualitas kehidupan. Disisi lain, dalam penelitian yang dilakukan oleh Alkire, konsep pembangunan manusia diterangkan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia ditujukan untuk memperbesar kebebasan individu dalam melakukan dan menjadi sesuatu yang menurut mereka bernilai. Secara prinsip, pembangunan manusia semestinya memberdayakan manusia, atau dengan kata lain, pembangunan manusia semestinya menjadikan manusia sebagai fokus utama.
2. Pembangunan manusia mencakup kebebasan dasar yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dan ini berlaku untuk semua Negara.
3. Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang dilakukan oleh manusia, berkaitan dengan manusia, dan ditujukan untuk manusia. Dengan demikian tidak mengenal apakah manusia tersebut miskin atau kaya, serta bertindak selaku orang pribadi atau sebagai anggota komunitas masyarakat. Intinya, manusia lah yang menjadi pemeran utama.

---

<sup>25</sup> Nasution, Zulkarimen, *Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 45-57.

Pembangunan manusia ditetapkan skala prioritas tertentu, antara lain memasukkan faktor pengentasan kemiskinan, keadilan, efisiensi, partisipasi, kesinambungan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembangunan manusia bersifat multidimensional dan setiap komponen didalamnya memiliki keterkaitan. Oleh karenanya diperlukan sudut pandang yang menyeluruh (*holistic*) dalam memahaminya. Paradigma pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan dari beberapa tahap sebagai berikut: Pertama, paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*): Kedua, pergeseran dari paradigma pertumbuhan menjadi paradig kesejahteraan (*Welfare paradigm*): dan Ketiga, paradigma pembangunan yang berpusat ada manusia (*people centered development paradigm*). Hal terpenting adalah pembangunan manusia dan bukan pembangunan benda (*the development of people rather than the development of things*), karena nilai balik riil pembangunan manusia memberikan sumbangan lebih daripada pembangunan dibandingkan pada pembangunan benda (fisik). Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*“a process of enlarging people’s choices”*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Era globalisasi merupakan suatu akibat revolusi yang terjadi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terbendung, sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif di dalam masyarakat. Terutama terhadap masyarakat yang sedang berkembang, sehingga dalam berbagai ilmu sosial kemasyarakatan terdapat menimbulkan banyak pemikiran-pemikiran baru termasuk dalam hal keislaman. Suatu penilaian ataupun evaluasi terhadap pemahaman keagamaan khususnya keislaman sangat penting untuk melihat kondisi manusia di era globalisasi.

Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling

manusiawi menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri arti pembangunan adalah: Pertama, adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Kedua, untuk mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. Kaum intelektual muslim menerima cita-cita dan ideologi nasional dan memanfaatkannya untuk melegitimasi kegiatan mereka, yang tujuan sebenarnya adalah menyebarkan cita-cita Islam. Cita-cita nasional pembangunan ekonomi diterima oleh kaum intelektual muslim dan ditransformasikan menjadi tugas Islam baik melalui jihad atau teologi pembebasan. Kaum intelektual muslim menyatakan bahwa Islam memunyai suara yang harus dihormati dalam urusanurusan selain perkara keagamaan semata<sup>26</sup>.

Khususnya dua sila dari pancasila, yakni keadilan sosial dan demokrasi (permusyawaratan), menjadi bagian penting. Adanya reorientasi kebijakan dan strategi pembangunan, di pusat dan daerah, yang lebih terpusat. Pembangunan manusia menjadi program yang selalu ada untuk diimplementasikan demi menyiapkan kualitas manusia yang baik untuk mengisi sektor-sektor yang dapat menguntungkan lagi menghasilkan. Hal ini tentu harus direncanakan dan dipersiapkan secara matang dan *sustainable* atau berkelanjutan, sehingga dapat mencapai pada hasil serta tujuan yang telah diperhitungkan. Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa keduanya adalah konsep-konsep Islam yang penting. Pembangunan adalah suatu kewajiban agama. Bukan hanya aspek-aspek tertentu agama Islam saja yang diajarkan, tetapi mereka juga terkait oleh keharusan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Lembaga-lembaga keagamaan mempunyai tugas yang penting untuk bekerja demi pembangunan manusia. Islam merupakan pemersatu kebanyakan masyarakat Indonesia, pengembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari program pendidikan Islam karena kegiatan pengembangan

---

<sup>26</sup> Sukma, "Islam Pembangunan", [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com). diakses 03 Mei 2020.

masyarakat adalah perwujudan dari konsep kewajiban manusia mengabdikan kepada Allah.

Pilar pembangunan manusia adalah istilah atau kebaikan/kemashlahatan bagi manusia. Al-Quran secara eksplisit menjelaskan akan larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan oleh manusia harus memerhatikan pilar ini. Pelaksanaan pilar bangunan ini hanya memberikan dua rambu yaitu halal dan haram yang masing-masing memiliki konsekuensi yaitu pahala atau dosa. Jika semua kebijakan terhadap pembangunan manusia membawa kebaikan bagi kualitas hidup manusia maka hal tersebut halal dilakukan dan mereka berhak mendapatkan pahala karena telah menjalankan ketaatan terhadap perintah Allah SWT sedangkan sebaliknya jika mereka membuat kebijakan yang dapat merusak kualitas hidup manusia maka hal tersebut haram dari sisi aturan dan dosa jika tetap dilakukan. Pada akhirnya, pembangunan kualitas manusia dengan menitikberatkan pada pembangunan keilmuan dan keimanan mampu menghasilkan generasi baru yang cerdas berilmu dan berkemajuan dan memiliki spirit keimanan dan tauhid kepada Allah SWT. Sehingga Islam hadir pada setiap pola pikir masyarakat, pada setiap pengambilan keputusan, serta pada segenap lini kehidupan di masyarakat. Implikasi lebih jauh dari hal tersebut adalah terciptanya lingkungan serta kehidupan sosial-masyarakat yang baik dan beradab.

Kemampuan kejiwaan merupakan sumber daya insani (sumberdaya manusia) yang dimiliki oleh manusia. Dengan seperangkat organ tubuh yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, manusia mempunyai daya atau potensi (kekuatan) yang apabila dikembangkan akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan akan menjadikan manusia yang sadar akan tanggung jawabnya baik tanggung jawabnya sebagai hamba Allah SWT dan sebagai khalifah Allah SWT. Manusia mempunyai sumber daya yang meliputi daya tubuh, daya hidup, dan daya akal. Apabila keempat daya tersebut dikembangkan, maka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti beriman, bertaqwa, berbudi pekerti luhur dan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah SWT dan sebagai khalifah Allah SWT.

Sebagaimana dalam hadits Rasulullah, Beliau bersabda : *sesungguhnya bekerja mencari rezeki yang halal itu merupakan kewajiban setelah ibadah farḍu* (HR. Tabrani dan Baihaqi). Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian (*biyadihu*) dan tidak cengeng. Setidaknya terdapat beberapa ayat Al-Quran maupun hadiṣ yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian ini, seperti: *Amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri* (HR. Abu Dawud). Islam memandang bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap insan. Karena dengan bekerja seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarganya serta dapat memberikan maṣlaḥah bagi masyarakat disekitarnya. Islam juga mengajarkan bahwa pekerjaan harus dilaksanakan oleh orang yang mengetahuinya dengan ilmu atau dengan ilmu atau dengan kata lain pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang ahli dibidangnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran dalam Firmannya : “...*dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya*”.(QS: Al-Isrâ’[17] : 36). Allah mengingatkan manusia agar mencegah keburukan dengan tidak berucap apa yang tidak diketahui, jangan mengaku tahu apa yang engkau tidak ketahui, jangan mengaku tahu apa yang engkau tidak ketahui, termasuk dalam hal ini mengaku punya pengetahuan atau kompetensi di suatu bidang padahal dia tidak memilikinya. Ayat ini menuntun manusia jika bekerja menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati sebagai alat-alat untuk meraih pengetahuan.

Pembahasan dalam Islam sosok manusia terdiri dua potensi yang harus dibangun, yaitu lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan ruhaniyah sebagai pengendali tubuh. Pembangunan manusia dalam Islam tentunya harus memerhatikan kedua potensi ini. Jika dilihat dari tujuan pembangunan manusia Indonesia yaitu menjadikan manusia seutuhnya, maka tujuan tersebut harus memerhatikan kedua potensi yang ada pada manusia. Islam memandang tinggi masalah sumberdaya manusia ini khususnya yang berkaitan dengan akhlak (sikap, pribadi, etika dan moral). Kualitas sumberdaya manusia menyangkut

banyak aspek, yaitu aspek sikap mental, perilaku, aspek kemampuan, aspek intelegensi, aspek agama, aspek hukum, aspek kesehatan dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek jasmaniah selalu ditentukan oleh ruhaniah yang bertindak sebagai pendorong dari dalam diri manusia. Untuk mencapai sumberdaya manusia berkualitas, usaha yang paling utama sebenarnya adalah memperbaiki potensi dari dalam manusia itu sendiri, hal ini dapat diambil contoh seperti kepatuhan masyarakat terhadap hukum ditentukan oleh aspek ruhaniah ini.

Di provinsi Banten sendiri Pembangunan manusia secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95, atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42. Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 mengalami akselerasi atau percepatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,74 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 0,65 persen. Status pembangunan manusia Banten pada tahun 2018, masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi”. Kategori “Tinggi” tersebut, diperoleh Banten sejak tahun 2015<sup>27</sup>.

Seiring kenaikan data IPM, di instrumen zakat, implementasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan mengalami tren naik setiap tahunnya dimulai awal 2010. Angka penyaluran ZIS bergerak dari ratusan ribu rupiah hingga di tahun 2016 sudah hampir menyalurkan diatas angka 4,799 milyar rupiah hingga ditahun 2019 sebesar 9,432 Milyar rupiah.

Perkembangan fiskal (di sisi Kebijakan Fiskal) di bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD Banten untuk tahun 2013 s/d tahun 2018 mengalami kenaikan. Jika dikalkulasikan menunjukkan bahwa rata-rata Kebijakan Fiskal di sektor pendidikan dan kesehatan meningkat sebesar 6,93% pertahun. Pertumbuhan ekonomi yang ada di Banten tidak stabil. Hal ini di karenakan naik turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Banten. Pada tahun 2010 yaitu sebesar

---

<sup>27</sup><https://banten.bps.go.id/pressrelease/2019/04/15/488/indeks-pembangunan-manusia--ipm--banten-pada-tahun-2018-mencapai-71-95-.html>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2020 Pkl 14.59 WIB.

(5,88%) naik di tahun 2013 sebesar (6,46%) kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar (5,68%) dan kembali mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 sebesar (5,61%) dan pada tahun 2017 (5,29%). Kemiskinan yang ada di Banten mengalami penurunan di setiap tahun dimulai pada tahun 2010 kemiskinan sebesar (16,88%) dan semakin turun pada tahun 2017 sebesar (12,90%).

Berdasarkan penjelasan semua di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam apakah meningkatnya Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten dipengaruhi oleh faktor apa saja, apakah pengelolaan zakat, Kebijakan fiskal (Kebijakan Fiskal), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga ikut mempengaruhi meningkatnya Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten, mengingat Provinsi Banten termasuk Provinsi yang terhitung baru di wilayah Indonesia. Dan juga jika zakat memiliki peranan penting dalam peningkatan pembangunan manusia di Banten maka penulis melanjutkan penelitian tentang zakat dengan memperkuat eksistensi pengelolaan zakat agar dijadikan sebagai instrumen dalam kebijakan program pembangunan manusia di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat masalah penelitian (*problem research*) yaitu perlu dilakukannya penelitian terkait dengan pengaruh zakat, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019. Atas identifikasi masalah ini, maka dijadikan dasar dalam penyusunan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh zakat terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019?
2. Bagaimana pengaruh fiskal terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019?

4. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019?
5. Bagaimana pengaruh zakat, fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019?
6. Bagaimana pengaruh dan strategi dalam upaya optimalisasi peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka dapat ditarik tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara utuh dan menyeluruh mengenai pengaruh zakat terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019;
2. Untuk menganalisis secara utuh dan menyeluruh pengaruh fiskal terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019;
3. Untuk menganalisis secara utuh dan menyeluruh pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019;
4. Untuk menganalisis secara utuh dan menyeluruh mengenai pengaruh kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019;
5. Untuk menganalisis secara utuh dan menyeluruh mengenai pengaruh zakat, fiskal, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019.
6. Untuk menganalisis secara utuh dan menyeluruh mengenai pengaruh dan strategi dalam upaya optimalisasi peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian dan rumusan di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka

untuk memperluas pengetahuan bagi masyarakat. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis dapat menambah, memperdalam, serta memperluas keilmuan mengenai pengaruh zakat khususnya, fiskal, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Banten.
- b. Zakat dapat digunakan sebagai indikator dan landasan serta memperkuat bagi Lembaga riset atau penelitian yang membahas tentang Pembangunan Manusia selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan atau pengetahuan dan pengalaman praktis dibidang ekonomi syariah khususnya mengenai pengaruh zakat, fiskal, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap pembangunan manusia;
- b. Hasil penelitian ini sangat berguna bagi masyarakat karena dapat memberi wawasan baru tentang zakat, fiskal, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta pembangunan manusia;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang ada di dalam kegiatan pengelolaan zakat, pengambilan keputusan terkait fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan dan menaikkan indeks pembangunan manusia.

## E. Kerangka Berfikir

Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut: pertama, untuk *grand theory*, digunakan teori : **teori masalah dari Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi**. Kedua, untuk *middle theory*, digunakan teori **Keynes dan Intervensi Negara (*at-tadakhkhul ad-daulah*)**. Ketiga untuk *applicative theory*, digunakan **teori birokrasi**.

### 1. Grand Theory (Teori Masalah)

Untuk *grand theory*, digunakan teori masalah Imam Al Ghazali dan Imam

Al-Syatibi.

Kedua, teori maşlahahnya al-Ghazali dan al-Syaṭibī. Bagi Al-Ghazaly (450-505 H), pada dasarnya menurut bahasa atau *'urf* kata maşlahah berarti meraih manfaat atau menghindarkan kemadaratan.<sup>28</sup> Menurut Al-Ghazali, sebagaimana dikemukakan oleh Juhaya S. Pradja, al-maşlahah pada dasarnya adalah "suatu gambaran meraih manfaat atau menghindarkan kemadaratan". Akan tetapi, bukan itu yang kami maksudkan sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemadaratan adalah tujuan dari kemaşlahahan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maşlahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara.<sup>29</sup>

Dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa bagi Al-Ghazaly al-maşlahah dalam pengertian syar'i adalah meraih manfaat dan menolak madarat dalam rangka memelihara tujuan syara (*maqasid al-syariah*), yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Al-Ghazaly lebih lanjut berpendapat, "Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara yang lima ini merupakan al-maşlahah. dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadah.

Sementara konsep al-maşlahah menurut Al-Syaṭibī, hampir sama dengan konsep Al-Ghazaly. Menurut Al-Syaṭibī, al-maşlahah adalah sesuatu yang difahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba dalam bentuk meraih kemaşlahahan dan menolak kemafsadatan yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan pada akal semata.<sup>30</sup> Meraih al-maşlahah juga adalah dalam rangka meraih tujuan syara (*maqasid al-syari'ah*), baik yang bersifat dharurriyat, hajjiyat ataupun tahsiniyyat yang berpijak pada lima tujuan syara yaitu : memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-maal*).

Sementara Juhaya S. Pradja juga dalam bukunya Filsafat Hukum Islam, menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Menurutnya, prinsip-prinsip hukum

<sup>28</sup> Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad At-Ghazali, *Mustasfa min ilmi al-ushul*, Juz I, @eirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 286.

<sup>29</sup> Juhaya S. Pradja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, ..... 154

<sup>30</sup> Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad al-Syatibi, *Al-I'tisham* (Makkah Al-Maktabah al-Mukarramah: at-Faishaliyah, t-t.), Juz II, I 13.

Islam ada 7 (tujuh), yaitu: prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar makruf nahi munkar, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-Hurriyyah*), prinsip persamaan atau egalite (*al-Musawah*), prinsip tolong-menolong (*al-Ta'awun*) dan prinsip toleransi (*al-tasa' muh*).<sup>31</sup>

Selain itu, penerapan prinsip kepastian hukum Islam hendaknya juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum Islam, antara lain "tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahahan (*taṣarrufu al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maṣlahah*). Kaidah ini didukung juga dengan kaidah "hukum yang diputuskan oleh hakim (penguasa) dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat" (*Hukmu al-ḥakim fi masail al-ijtiḥad yarfa'u al--khilaf*).

## 2. *Middle Theory* (Teori Keynes dan Intervensi Negara)

### a) Teori Keynes

Keynesianisme, atau ekonomi ala Keynes atau Teori Keynes, adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20, John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran, dimana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi *laissez-faire*, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara.

Teori ini menyatakan bahwa trend ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan output potensial, Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya (sehingga permintaan agregat bertambah). Selain

<sup>31</sup> Juhaya S. pradja Filsapat Hukum Islam, 69-78.

itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal.

Kesimpulan utama dari teori ini adalah bahwa tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan output dan lapangan pekerjaan ke kondisi lapangan kerja penuh. Kesimpulan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi klasik seperti ekonomi *supply-side* yang menganjurkan untuk tidak menambah peredaran uang di masyarakat untuk menjaga titik keseimbangan di titik yang ideal<sup>32</sup>.

### **b) Teori Intervensi Negara (al-Tadakhkhul al-Daulah)**

Intervensi negara (*al-tadakhkhul al-daulah*) menurut Aş-Şadr sebagaimana dikutip oleh Ija Suntana adalah negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, negara harus melarang jual-beli air milik publik, transaksi bisnis dengan bunga, atau penyerobotan lahan mati bukan untuk kegiatan produktif<sup>33</sup>.

Kewenangan negara untuk mengintervensi aktivitas ekonomi seperti penambangan bahan-bahan mineral dari alam (baik oleh individu dan kelompok) merupakan asas yang fundamental dalam system ekonomi Islam. Intervensi ini tidak sekedar mengadaptasi hukum Islam yang sudah tertera dalam teks-teks dalil, namun mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam hukum Islam<sup>34</sup>.

Dalam aktivitas ekonomi, terdapat hubungan manusia dengan kekayaan alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya, dan hubungan antar sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak dan kewajiban. Hubungan manusia dengan kekayaan alam terkait dengan pengalaman dan pengetahuannya.<sup>35</sup>

### **3. *Aplicative Theory* (Teori Birokrasi)**

---

<sup>32</sup> Keynesianisme. <https://id.wikipedia.org/wiki/Keynesianisme>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2020 pkl. 10.00 WIB.

<sup>33</sup> Ija Suntana, *Politik ekonomi Islam: siyasah maliyah : teori-teori pengelolaan sumber daya alam, hukum pengairan Islam, dan undang- undang sumber daya air di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia, 2010. 54

<sup>34</sup> Ija Suntana, *Politik ekonomi Islam: siyasah maliyah : teori-teori pengelolaan sumber daya alam, hukum pengairan Islam, dan undang- undang sumber daya air di Indonesia, .....55*.

<sup>35</sup> Ija Suntana, *Politik ekonomi Islam: siyasah maliyah : teori-teori pengelolaan sumber daya alam, hukum pengairan Islam, dan undang- undang sumber daya air di Indonesia, .....55*

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tidak bisa dihindari dalam konsep negara modern. Hadirnya birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Negara dituntut untuk terlibat secara langsung dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya (*public goods and services*), baik dalam keadaan tertentu negara memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat yang disebut sebagai birokrasi<sup>36</sup>.

Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang secara dinamis disertai dengan peningkatan taraf hidup dan pendidikan masyarakat ditambah dengan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi menjadikan peningkatan proses pemberdayaan lingkungan masyarakat menjadi penting. Oleh karena itu pelayanan bagian dari sektor publik juga diharapkan mengikuti perubahan yang terjadi secara cepat dan dinamis sebagaimana di masyarakat<sup>37</sup>.

Keberhasilan pembangunan ekonomi, sosial dan politik di negara manapun tergantung pada kualitas dan efektifitas aparatur birokrasi. Oleh sebab itu, karena merekalah yang menjadi pelaksana kebijakan dari suatu negara atau pemerintah<sup>38</sup>. Tuntutan masyarakat terhadap pelayan publik terus meningkat seiring dengan meningkatnya dinamika masyarakat dan perkembangan jaman, kondisi ini perlu diimbangi dengan kualitas aparatur birokrasi yang baik, peka dan tanggap dalam menangkap aspirasi masyarakat. Untuk mendukung, mempercepat dari pembangunan negara dan daerah dibutuhkanlah posisi birokrasi dan aparatur sipil negara yang netral dan profesional dalam menjalankannya<sup>39</sup>.

Posisi birokrasi dan aparatur sipil negara sebagai pelayan sektor publik haruslah menciptakan suatu sistem pelayanan yang lebih efektif dan efisien dan

---

<sup>36</sup> Eko Prasajo, Dkk. *Mengurai Benang Kusut Birokrasi*” Upaya Memperbaiki Centang Perenang Rekrutmen PNS. (Depok, PIRAMEDIA. Cetakan pertama 1 Agustus 2006). 76

<sup>37</sup> Habibuddin Siregar, “Analisi Kinerja Aparatur Biorkrasi”. Vol, 1. No, 1. Juni 2011. 51

<sup>38</sup> Rudi Kinandung, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Birokrasi Pemerintah”. Vol, 1. No, 1. Juni 2012. 35

<sup>39</sup> Marzuki, M. Ag. Dkk. Artikel, “Model Birokrasi Pemerintahan Era Otonomi Daerah”. 4. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/28.+Model+Birokrasi+Pemerintah+Era+Otonomi+Daerah.pdf>. Di akses pada tgl 19 Mei 2020 Pkl. 09.30. WIB.

melahirkan kebijakan publik yang rasional dan demokratis secara profesional. Profesionalisme birokrasi dan netralnya aparatur sipil negara tersebut menggambarkan bahwa tugas utama dari birokrasi adalah mengabdikan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari negara. Secara konsep, menurut Weber birokrasi adalah organisasi yang ditunjukkan untuk memaksimalkan efisiensi dalam organisasi yang memiliki spesialisasi tugas-tugas, hierarki otoritas badan perundang-undangan, sistem pelaporan yang baik untuk memudahkan dalam tanggung jawab serta anggota memiliki keahlian khusus dalam menjalankan tugasnya<sup>40</sup>.

Dalam terminologi ilmu politik model birokrasi Weber tersebut menganggap sebuah birokrasi sebagai sebuah organisasi kolektif terdiri dari pejabat-pejabat yang secara jelas dan pasti dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan serta pengaruh dari pejabat tersebut dapat dirasakan oleh seluruh anggota organisasi. Karena pada hakekatnya birokrasi mengandung implikasi pengorganisasian yang tertib, tertata dan teratur dalam hubungan kerja yang secara berjenjang serta aturan prosedur dalam garis tatanan organisasi<sup>41</sup>. Weber mengutarakan bahwa ada tiga otoritas kewenangan yang dimiliki oleh seseorang dalam organisasi birokrasi. Pertama, otoritas rasional. Kedua, otoritas tradisional, dan ketiga otoritas kharismatik.

Netralitas dari fungsi birokrasi pemerintahan dalam konsepnya Weber dikenal dengan konservatif, menurut Weber birokrasi dibentuk atas dasar netral dan tanpa adanya gangguan dari yang dapat merusak birokrasi dari kekuatan politik, artinya birokrasi pemerintah diposisikan sebagai kekuatan yang netral dalam sebuah negara yang berkerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam bidangnya. Netralitas birokrasi secara esensial menjadi penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak tanpa memihak terhadap kelompok tertentu. Artinya siapapun yang memerintah dalam sebuah negara birokrasi tetap

---

<sup>40</sup> Data Wardana & Geovani Meiwanda, "*Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih dan Bermartabat*". Vol. III. No. 1. April 2017. 331.

<sup>41</sup> Miriam Budiardjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*". (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan keempat, Oktober 2010). 64

memberikan pelayan pada sektor publik secara efektif dan efisien<sup>42</sup>.

Birokrasi pemerintah dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu: (1) Birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan. (2) Birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang di sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan. (3) Birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya berhubungan langsung dengan masyarakat, yang dimana fungsi utamanya adalah pelayanan sektor publik<sup>43</sup>.

Terdapat beberapa karakter utama dalam melihat dan memahami proses perjalanan sebuah birokrasi. Diantaranya, Pertama, domain dalam wilayah kemandirian birokrasi yang masih berada pada kategori rendah namun pada wilayah yang lain adalah demokrasi yang dijalani masih ada pada wilayah yang lebih rendah, maka birokrasi diletakkan sebagai instrumen dari penguasaan serta keberpihkan dalam politik serta memobilisasi masa dalam mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun kelompok dalam kegiatan politik. Dalam sejarah birokrasi di Indonesia diawal kemerdekaan sampai pada awal reformasi, kondisi birokrasi Indonesia mengalami posisi yang buruk karena birokrasi tidak sepenuhnya menjalankan fungsi secara semestinya, tetapi birokrasi dijalankan dengan orientasi untuk kelompok-kelompok tertentu.

Kedua, dalam wilayah kemandirian birokrasi untuk mengelola sumber daya masih berada pada kategori menengah, hal ini menunjukkan belum adanya perubahan pengelolaan birokrasi secara signifikan, pada wilayah yang lain demokrasi juga masih belum mapan untuk menciptakan sebuah sistem yang ideal. Perjalanan birokrasi sebagai penghubung kepentingan publik masih jauh dari kenyataan, justru sebaliknya birokrasi bekerja untuk rezim, akhirnya melahirkan sistem sentralistik.

Ketiga, tingkat kemandirian birokrasi yang tinggi dan orientasi sudah

---

<sup>42</sup> M. Adian Firas, "Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi". Vol, 06. No, 01. Juni 2016. 165

<sup>43</sup> Syamsul Ma'arif, "Posisi Strategis Birokrasi Dalam Transformasi Government ke Governance". Vol, 4. No, 2. Juli-Desember 2013. 112

berubah, yakni tingkat kerja yang efektif dan efisien serta kualitas pelayanan sektor publik yang baik. Sedangkan karakter birokrasi ini dapat dilihat sejak masa transisi demokrasi pada tahun 1998 sampai saat ini. Untuk mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintah maupun untuk merubah sistem kerja birokrasi yang kaku dan pasif perlu dilakukan reformasi birokrasi yang berorientasi untuk membentuk aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional menuju tata pemerintahan yang baik. Upaya secara serius ini agar dapat dilihat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat tentang eksistensi birokrasi sebagai pelayan masyarakat.

## F. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya.<sup>44</sup> Sehingga hipotesis merupakan pernyataan sementara yang perlu dibuktikan melalui proses penelitian.

Dikenal dua macam hipotesis, yaitu hipotesis Deskriptif dan hipotesis relasional. Adapun hipotesis relasional dibagi menjadi dua, yaitu Hipotesis komparatif dan hipotesis asosiatif.

Mengacu pada perumusan masalah yang telah ditetapkan, perumusan masalah semuanya bersifat komparatif sehingga harus dibuktikan dalam penelitian ini.

Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menolak atau menerima suatu hipotesis. Sehingga agar pemilihan lebih rinci dan mudah diperlukan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif biasanya disingkat  $H_1$  yang merupakan tandingan dari hipotesis nol yang disingkat  $H_0$ . Hipotesis alternatif disebut juga hipotesis kerja atau hipotesis penelitian yang cenderung dinyatakan dalam kalimat positif. Adapun hipotesis nol biasanya dinyatakan dalam kalimat negatif. Mengacu pada kerangka berpikir di atas, maka dalam penelitian ini ditetapkan hipotesis sebagai berikut :

1. Hipotesis terkait pengaruh zakat terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019

---

<sup>44</sup> Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistik, Kedua. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 119.

$H_{01}$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan zakat terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019

$H_{11}$  : Terdapat pengaruh yang signifikan zakat, terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019

2. Hipotesis terkait pengaruh fiskal terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019

$H_{02}$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan fiskal terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019

$H_{12}$  : Terdapat pengaruh yang signifikan fiskal terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019.

3. Hipotesis terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019.

$H_{03}$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019

$H_{13}$  : Terdapat pengaruh yang signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019

4. Hipotesis terkait pengaruh kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019.

$H_{04}$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019

$H_{14}$  : Terdapat pengaruh yang signifikan kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019

5. Hipotesis terkait pengaruh zakat, fiskal, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019.

$H_{05}$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan zakat, fiskal, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019

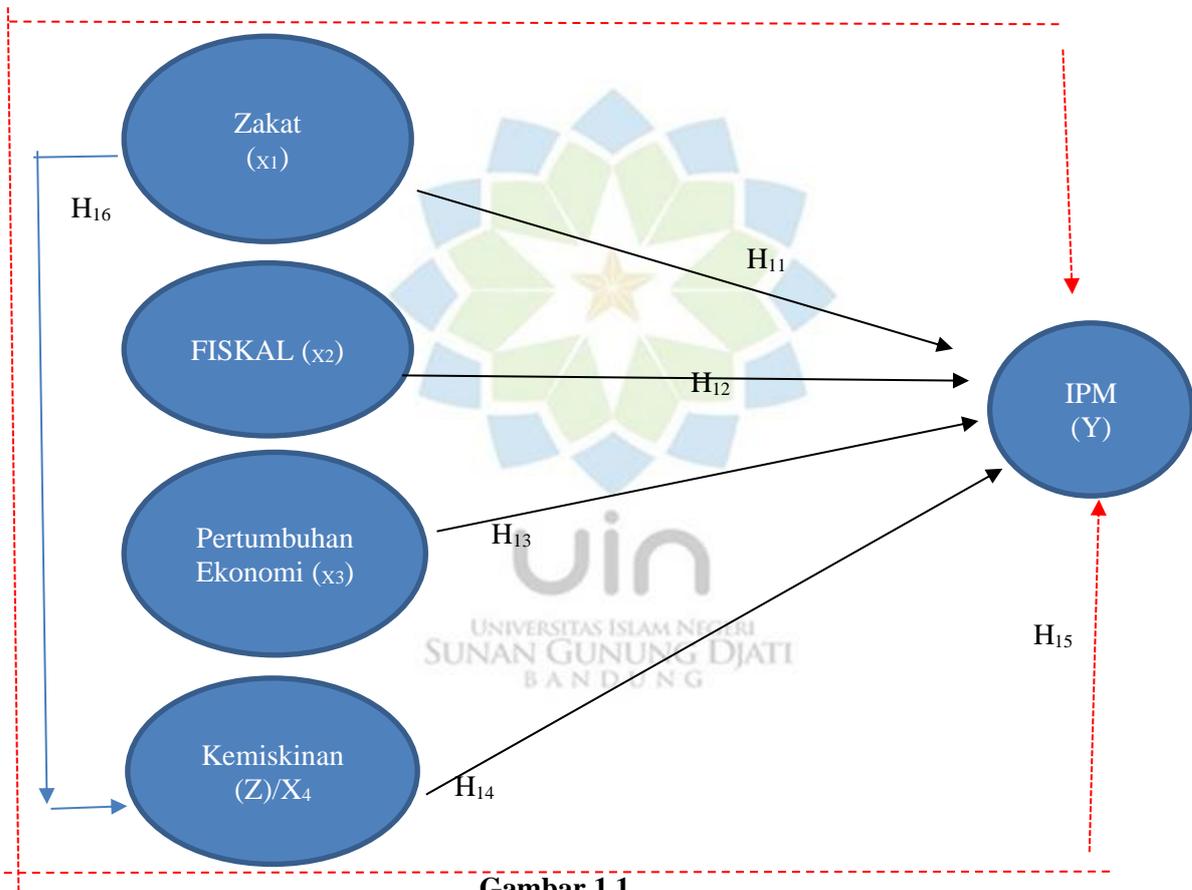
$H_{15}$  : Terdapat pengaruh yang signifikan zakat, fiskal, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Banten periode 2010-2019

6. Hipotesis terkait pengaruh zakat, fiskal, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.

$H_{06}$ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan zakat, fiskal, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Banten periode 2010-2019

$H_{16}$  : Terdapat pengaruh yang signifikan zakat, fiskal, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Banten periode 2010-2019

Berdasarkan hipotesis tersebut maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.1**  
**Model Penelitian**

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian adalah proses yang berkelanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu dapat dijadikan pijakan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian-penelitian yang membahas zakat,

fiskal (sisi pengeluaran pemerintah), pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta index pembangunan manusia dapat dijadikan rujukan.

### 1. Penelitian tentang Zakat

Disertasi mengenai *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah)*, yang dilakukan oleh Sri Kusriah<sup>45</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah politik hukum pengelolaan zakat telah menimbulkan kebijakan pengelolaan zakat yang aplikatif, kebijakan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah, serta prospek politik hukum pengelolaan zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) politik hukum pengelolaan zakat belum diikuti oleh kebijakan yang aplikatif, karena belum ada kebijakan yang mengatur tentang zakat adalah kewajiban umat Islam yang telah mampu berzakat, dan membayar zakat kepada lembaga BAZNAS maupun LAZ, begitu juga dalam hal pendistribusiannya, agar memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kewilayahan dapat tercapai. 2) Kebijakan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Tengah dalam hal kebijakan penataan kelembagaan diatur dengan surat keputusan kepala daerah, dalam hal pengumpulan diatur dengan surat edaran kepala daerah, dan dalam hal pendistribusian diatur oleh masing-masing BAZDA melalui program kerja yang dibentuk. 3) Prospek politik hukum pengelolaan zakat, dalam hal kebijakan implementasinya harus menempatkan negara sebagai motivator, fasilitas dan pelopor dalam pembayaran zakat, melalui BAZNAS dan LAS dengan demikian diharapkan penerimaan zakat semakin meningkat, sehingga zakat dapat digunakan sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

Disertasi mengenai *Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, yang dilakukan oleh Hamzah<sup>46</sup>. Kesimpulan besar disertasi ini membuktikan bahwa Badan Amil Zakat

---

<sup>45</sup> Sri Kusriah, *Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah)*. Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015.

<sup>46</sup> Hamzah, *Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Disertasi Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Nasional (BAZNAS) pada dasarnya telah melakukan pendayagunaan zakat untuk peningkatan kesejahteraan umat sesuai dengan pola yang dilakukan Rasulullah SAW. Pada satu sisi dan pada saat yang sama dalam batas-batas tertentu, BAZNAS dipandang telah mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen. Namun, dalam hal pengembangan, baik aspek kelembagaan maupun pada program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan umat, ditemukan sejumlah kendala yang menjadikan kinerja badan ini tidak optimal. Kesimpulan ini berimplikasi bahwa pada dasarnya badan ini dapat dinyatakan sebagai institusi kesejahteraan umat dan telah menampilkan diri sebagai institusi pengelola zakat yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. Prototipe institusi BAZNAS dan kinerjanya yang demikian itu telah membantah pandangan sebagian pengamat terhadap citra pengelola zakat yang semula menempatkan amil sebagai "pekerjaan sampingan" dan "terkesan membagi-bagi uang zakat" menjadi sebuah pekerjaan yang profesional dan akuntabel. Hasil penelitian disertasi ini tidak dimaksudkan untuk memperlemah dan memperkuat terhadap teori tertentu dalam objek penelitian yang sama yakni pada BAZNAS, karena belum ada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Namun, dilihat dari sisi bidang kajian disertasi ini, yakni pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, maka ditemukan pandangan-pandangan tertentu yang dapat dikaitkannya. Disertasi ini, di antaranya, telah memperkuat pandangan yang menginginkan agar dikembangkan pengelolaan zakat yang menganut pendekatan partisipasi. Menurut Palmawati (Disertasi 2004) pengagas pendekatan ini, keterlibatan stakeholder untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan. Disertasi ini membuktikan bahwa BAZNAS dalam pendayagunaan zakat, telah melibatkan mustahik sebagai bagian *stakeholder* berpeluang dalam posisi untuk tidak saja secara pasif menerima zakat, tetapi berkesempatan untuk memberdayakan dirinya. Selain itu, disertasi ini mendukung gagasan yang diusung oleh Yusuf Qardawy (1985) yang menetapkan dasar-dasar struktur bagi organisasi pengelola zakat yang mengarah pada pendayagunaan zakat. Afzalur Rahman (1992) memberikan penekanan yang lebih tajam tentang eksistensi pengelola zakat, agar zakat dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, maka diperlukan badan zakat. Data

penelitian ini disumberkan dari selain data kepustakaan juga data lapangan penelitian. Data penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara sebanyak lima informan internal Badan ini dan tujuh informan eksternal yang merupakan praktisi pada BAZDA dan LAZ serta telaah dokumentasi BAZNAS sebanyak sebelas buah dokumen. Dalam membaca data penelitian, pendekatan yang dipergunakan yaitu sejarah hukum Islam, manajemen, serta sosiologi.

Disertasi mengenai *Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia*, yang dilakukan oleh Holilur Rahman<sup>47</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara berperan penting dalam menjaga harta dan memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan kewenangan pengelolaan zakat melalui regulasi zakat tentang kewenangan amil dalam pengumpulan zakat. Adapun bentuk regulasi zakat berupa pembentukan dan pengkoordinasian institusi zakat BAZNAS; Provinsi, Kabupaten/kota dan LAZ sebagai operator dan Kementerian Agama sebagai regulator. Dan juga regulasi zakat bagi muzaki dalam pembayarannya masih bersifat himbauan, belum bersifat kewajiban hukum nasional. Upaya strategi yang dilakukan BAZNAS dalam kewenangannya berpengaruh signifikan dalam optimalisasi kelembagaan zakat, namun kurang optimal di dalam mempengaruhi pengumpulan zakat. Kesimpulan dalam penelitian adalah transformasi hukum agama menjadi hukum nasional dapat efektif jika mengandung substansi mengikat, daripada hukum agama bersifat ketaatan saja. Penelitian ini sependapat dengan Yusuf Al-Qaradhawi (1993), Palmawati Taher (2004), Farah Aida Ahmad Nadzri dkk (2012), Saidurrahman (2013) yang menyatakan bahwa Islam memiliki prinsip-prinsip dan sistem pengelolaan zakat terkait dengan kewenangan amil dalam pengumpulan zakat. Penelitian ini tidak sependapat dengan C . Snouck Hurgronze (1889), Robert D. McChesney (1993), Amelia Fauzia (2008), Said Abdullah Syahab (2014) yang menyebutkan bahwa tiadanya aturan kewenangan yang melekat bagi amil dalam pengumpulan zakat.

Disertasi mengenai *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan*

---

<sup>47</sup> Holilur Rahman, *Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat Di Indonesia*. Disertasi Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

*Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)*, yang dilakukan oleh : Ihwan Wahid Minu<sup>48</sup>. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Mekanisme pengelolaan zakat BAZNAS Kota Makassar terbagi menjadi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan yang BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar lakukan terdiri dari perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini terlihat dari terdapatnya program yang skalanya tahunan dan insidental. Pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar terdiri atas perumusan kerja, penetapan tugas pokok, perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan dalam fungsi-fungsi, departementasi, penetapan otoritas organisasi, staffing dan fasilitating. Pelaksanaan yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar terdiri atas pengumpulan dana zakat dan pendistribusian dana zakat. Pengumpulan dana zakat dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa instansi, seperti PNS, SKPD, BUMN, BUMS, masjid, dan lain-lain. Adapun penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar disesuaikan dengan program kerja yang telah dibuat dan disalurkan pada 8 asnaf. Pengumpulan dan penyaluran masih belum maksimal sebab masih terdapat banyak kendala. Pengawasan yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar terdiri atas tiga bentuk yaitu pengawasan sendiri yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing individu pengurus yang lahir dari kesadaran masing-masing, pengawasan organisasi yaitu sistem pengawasan formal yang digunakan sebagai ukuran standar penilaian terhadap hasil kerja, dan pengawasan masyarakat. Semua bentuk pengawasan ini, telah berjalan pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar, 2) Dalam usaha mengentaskan kemiskinan melalui zakat, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar secara umum memiliki dua bentuk program yaitu bantuan dana konsumtif dan bantuan dana produktif. Bantuan zakat konsumtif yaitu bantuan yang langsung di berikan kepada mustahik dan bersifat konsumtif. Adapun bantuan zakat produktif adalah bantuan zakat kepada

---

<sup>48</sup> Ihwan Wahid Minu, *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)*. Disertasi. Pasca Sarjana UIN Alaudin Makassar, 2017.

mustahik dalam bentuk modal usaha bergulir. Dua jenis bantuan ini telah berjalan, meskipun belum terlalu maksimal disebabkan banyaknya kendala yang dihadapi.

## **2. Penelitian terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia**

Jurnal Internasional dengan judul, *The Analysis of The Effects of HumanDevelopment Index and Opened Unemployment Levels to The Poverty in Indonesia*. Oleh Saparuddin Mukhtar<sup>49</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder tentang indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan presentase kemiskinan. Data diperoleh dari data panel dari 33 provinsi di Indonesia selama 4 tahun dari tahun 2011 sampai 2014. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi dengan menggunakan Random Effect berdasarkan hasil uji test Lagrange Multiplier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel bertujuan untuk mengetahui adanya analisis terhadap pengaruh perbedaan entitas dan atau pengaruh perbedaan periode pengamatan. Data diolah menggunakan software Eviews 8.

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : pertama, Berdasarkan analisis dalam model random effect menggunakan uji t dapat disimpulkan bahwa secara parsial indeks pembangunan manusia berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Kedua, Berdasarkan analisis dalam model random effect menggunakan uji t dapat disimpulkan bahwa secara parsial tingkat pengangguran terbuka berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

---

<sup>49</sup> Saparudin Mukhtar, Firmansyah, The Analysis of The Effects of HumanDevelopment Index and Opened Unemployment Levels to The Poverty in Indonesia. *Jurnal Ecoplan* Vol.2 No.2, Oktober 2019, 77-89.

Ketiga, Berdasarkan analisis dalam model random effect dan menggunakan uji f dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh dan signifikan secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memberi dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Ini membuktikan bahwa zakat yang dikelola dengan baik oleh institusi amil yang amanah dan professional, maka implikasi terhadap pengurangan jumlah rumah tangga miskin dan mengecilnya kesenjangan pendapatan penerima zakat dapat direalisasikan. Rendahnya penurunan nilai rasio Gini pasca zakat dalam penelitian ini akibat masih rendahnya angka aktualisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara produktif. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya yang lebih maksimal di dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara produktif melalui sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban dan harta-harta yang dikenai zakat dan mengupayakan agar para muzakki (wajib zakat) membayarkan zakatnya melalui organisasi pengelola zakat yang sah serta menciptakan program zakat produktif yang inovatif dan kreatif. Sebab Kahf (1999) mengingatkan bahwa distribusi zakat tidak akan pernah dapat mengentaskan kemiskinan jika "kue" zakat yang dibagi masih kecil. Diskursus tentang zakat sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan tidak dapat menghindari dari pertanyaan bagaimana memperluas basis zakat sehingga diameter "kue" zakat yang akan dibagi menjadi lebih besar.

Penelitian tentang, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. Yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama<sup>50</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik mustahik yang mengikuti program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS dan efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan kewirausahaan masyarakat miskin yang di proxykan oleh mustahik.

Hasil Peneliian ini menyebutkan : Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik mustahik yang memperoleh dana zakat produktif

---

<sup>50</sup> Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104

dari baznas didominasi dari gender perempuan, dimana berdasarkan penelitian ini kaum perempuan mencapai 92,5%. Karakteristik latar belakang pendidikan mustahik Baznas yang memperoleh dana zakat produktif didominasi oleh masyarakat yang berlatar belakang pendidikan SMA lalu diikuti oleh SD. Pemberian dana zakat juga didominasi oleh mustahik yang mempunyai pengalaman berusaha lebih dari 5 tahun.

Secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini dinyatakan oleh 45% responden yang terlibat dalam penelitian ini dan cukup baik dinilai dari 55% dari total responden.

Berdasarkan data empirik diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif. Dan zakat menjadi instrument keuangan yang efektif dalam permasalahan modal kaum miskin. Hal ini bisa terlihat dari Headcount Ratio yang menurun dari 0,8 menjadi 0,5. Indeks kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunan dimana poverty gap menurun dari Rp. 547.843 menjadi Rp. 210.020. Demikian pula dengan nilai I yang mengalami penurunan dari 0,44 menjadi 0,17 dimana hal tersebut menunjukkan penurunan kesenjangan pendapatan. Nilai indeks Sen juga mengalami penurunan dari 0,50 menjadi 0,24. Demikian pula halnya dengan angka indeks FGT. Nilai indeks FGT juga mengalami penurunan dari 0,27 menjadi 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan instrument yang tepat dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Agar program zakat produktif dapat berjalan dengan efektif dan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara signifikan, diperlukan upaya dari seluruh umat Islam baik pemerintah, badan amil zakat, masyarakat di Indonesia, dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya, sehingga zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Disamping itu, agar efektif dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna dengan salah satunya melakukan pendampingan dalam mengelola dana bagi yang membutuhkan, sehingga dana yang dialokasikan kepada mustahik pada akhirnya akan

meningkatkan kesejheeraannya dan membawanya keluar dari kemiskinan.

Penelitian tentang *Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor (Influence of Zakat on Human Development Index and Poverty Level of Mustahik: Case Study of BAZNAS Utilization in Bogor)*. Oleh : Rina Murniati dan Irfan Syauqi Beik. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui : 1) Apakah terjadi perubahan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat? 2. Bagaimana pengaruh zakat terhadap tingkat IPM mustahik? 3. Bagaimana pengaruh zakat terhadap tingkat kemiskinan mustahik?.

Hasil penelitian ini menyimpulkan : Pendayagunaan zakat oleh BAZ Kota Bogor selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Total penerimaan zakat sempat mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2011. Sementara total penerimaan dari ZIS BAZ dan mitra BAZ menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk penyaluran dana zakat berdasarkan asnaf, program yang menerima dana paling besar adalah program kemanusiaan, kemudian program kesehatan.

Distribusi zakat kepada mustahik menunjukkan terjadinya perubahan pada tingkat pendapatan mustahik. Dengan menggunakan Uji t-Statistik, ditemukan bahwa pendapatan mustahik sebelum dan setelah distribusi zakat berbeda pada taraf nyata 5 persen. Dengan kata lain, distribusi zakat dapat meningkatkan tingkat pendapatan mustahik.

IPM mustahik sebelum dan setelah distribusi zakat berada pada status rendah. Nilai IPM sebelum distribusi zakat sebesar 47 dan setelah distribusi zakat menjadi 49. Meski terjadi perubahan nilai IPM sebesar 4.1 persen dengan adanya program pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kota Bogor, nilai IPM mustahik tidak mengalami perubahan status.

Adapun pengaruh zakat terhadap kemiskinan sangat baik. Hasil analisis dari 60 mustahik menunjukkan bahwa nilai headcount index mustahik turun dari 0.85 menjadi 0.77. Nilai poverty gap index mustahik mengalami penurunan dari sebelum distribusi zakat sebesar Rp 536 265.89 menjadi Rp 301 755.66 pasca zakat. Hal yang sama juga terjadi pada indeks kesenjangan pendapatan dimana

indeks kesenjangan pendapatan turun dari sebelum distribusi zakat sebesar 0.43 menjadi 0.24 setelah distribusi zakat.

Nilai indeks Sen juga mengalami penurunan dari 0.84 menjadi 0.76. Penurunan pada semua nilai indikator kemiskinan tersebut mengindikasikan bahwa program pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kota Bogor terbukti memiliki implikasi yang positif terhadap pengentasan kemiskinan dan berperan baik dalam meningkatkan pembangunan manusia.

Hasil analisis Gp sebelum distribusi zakat merepresentasikan kesejangan pendapatan yang sangat tinggi diantara mustahik. Nilai Gp mustahik sebelum menerima dana zakat adalah sebesar 0.98. Mengalami penurunan menjadi 0.97 setelah mustahik menerima bantuan zakat. Perubahan Gp mustahik hanya sebesar 1 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah pemberian zakat, kesenjangan pendapatan mustahik masih sangat tinggi. Ini bisa dikarenakan dalam distribusi zakat, BAZ Kota Bogor belum memperhatikan dari sisi pembobotan dana zakat yang diberikan kepada masing-masing mustahik.

Penelitian tentang *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Asean-4 (Studi Pada 4 Negara Asean)*, oleh Ahmad Syaifullah dan Nazarudin Malik<sup>51</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN. Metode alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan metode analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-4. Dengan nilai probabilitas sebesar  $0.1149 > \alpha = 0,10$  dan  $t\text{-hitung} - 1.617874 < t\text{-tabel} 1.686$ . Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-4 dalam kurun waktu 2005-2014. Dan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-4.

---

<sup>51</sup> Ahmad Syaifullah dan Nazarudin Malik, *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Asean-4 (Studi Pada 4 Negara Asean)*. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 1/2017 Hal. 107 – 119.

Dengan nilai probabilitas sebesar  $0.0000 < \alpha = 0,10$  dan t-hitung  $-4.718732 > t$ -tabel 1.686. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan di ASEAN-4 pada kurun waktu 2005-2014. Berdasarkan dari hasil dan kesimpulan di atas maka penulis dapat menuliskan saran sebagai berikut; organisasi ASEAN sebagai wadah perkumpulan negara-negara asia tenggara diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik, terkait dengan permasalahan tingkat kemiskinan di ASEAN yang masih lumayan cukup tinggi dan juga dapat menurunkan ketimpangan antar negara anggota ASEAN, pembangunan ekonomi di suatu negara tidak pernah lepas dari peran pemerintah, maka dari itu setiap negara-negara ASEAN-4 harus proaktif dalam upaya peningkatan perekonomian di setiap negara, seperti peningkatan IPM, PDB, khususnya dalam hal peningkatan IPM pada masyarakat miskin agar lebih diperhatikan lagi, dan untuk PDB agar selalu ditingkatkan minimal tidak boleh menurun. Serta setiap negara wajib hukumnya untuk terus menekan tingkat kemiskinan agar terus menurun, dan terakhir saran dari penulis ialah terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, variabel yang di gunakan dalam penelitian ini masih sangat terbatas yakni, hanya dua variabel yang digunakan antara lain, “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Bruto\*(PDB). Sedangkan berdasarkan teori yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan tidak terbatas pada variabel yang digunakan pada penelitian ini. Maka dari itu, harapan penulis bagi peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabelvariabel lainnya.

Penelitian tentang *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah*. Oleh Denni Sulisty Mirza<sup>52</sup>. Kesimpulan penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan panel data pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2006-2009 diperoleh hasil bahwa kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah yang berarti kemiskinan yang semakin

---

<sup>52</sup> Denni Sulisty Mirza, *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah*. Jurnal JEJAK, Volume 4, Nomor 2, September 2011.

menurun maka Indeks Pembangunan Manusia semakin meningkat. Berdasarkan nilai koefisiennya yang bertanda negatif, dapat disimpulkan bahwa apabila tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,208. Signifikansi variabel kemiskinan terhadap IPM ditunjukkan pada probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada taraf 5%. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah yang berarti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan nilai koefisiennya yang bertanda positif, dapat disimpulkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,153. Signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi terhadap IPM ditunjukkan pada probabilitas sebesar 0,029 signifikan pada taraf 5%. Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah yang berarti semakin tinggi belanja modal yang dikeluarkan maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan nilai koefisiennya yang bertanda positif, dapat disimpulkan bahwa apabila belanja modal yang dikeluarkan pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,274. Signifikansi variabel belanja modal terhadap IPM ditunjukkan pada probabilitas sebesar 0,025 signifikan pada taraf 5%. Jika dilihat dari peningkatan IPM, artinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil merealisasikan belanja modal tersebut untuk kebutuhan barang publik dalam aspek pendidikan dan kesehatan guna menuju pada kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran antara lain bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota disarankan dalam peningkatan IPM melalui pengentasan kemiskinan untuk periode tahun selanjutnya agar tetap mengacu pada program sebelumnya yaitu pro-poor, pro-job, dan pro-growth namun dengan lebih menekankan pada penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih memadai. Selain itu, koordinasi di antara *stakeholders* maupun instansi pengampu secara berjenjang dari tingkat provinsi sampai dengan

kabupaten/ kota harus dioptimalkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih maupun terlewatnya sasaran penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah kabupaten/kota disarankan dapat mempertahankan kemampuan merealisasikan pengalokasian anggaran untuk pengeluaran/belanja pemerintah di tahun-tahun selanjutnya terutama seperti sarana prasarana pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Penulis</b>	<b>Metode &amp; Model</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
2009	<i>Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat</i>	Hamzah	Metode regresi linier berganda dan uji interaksi	<i>Pendayagunaan Zakat, Kesejahteraan Umat</i>	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada dasarnya telah melakukan pendayagunaan zakat untuk peningkatan kesejahteraan umat sesuai dengan pola yang dilakukan Rasulullah SAW. Pada satu sisi dan pada saat yang sama dalam batas-batas tertentu, BAZNAS dipandang telah mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen.
2011	<i>Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah</i>	Mirza	Metode regresi linier berganda dan uji interaksi	<i>Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Belanja Modal, IPM</i>	Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah yang

					berarti kemiskinan yang semakin menurun maka Indeks Pembangunan Manusia semakin meningkat
2012	<i>Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik : Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor (Influence of Zakat on Human Development Index and Poverty Level of Mustahik: Case Study of BAZNAS Utilization in Bogor).</i>	Rina Murniati dan Irfan Syauqi Beik	Regresi dan Moderasi	<i>Pengaruh Zakat, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat kemiskinan</i>	Pendayagunaan zakat oleh BAZ Kota Bogor selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Untuk penyaluran dana zakat berdasarkan asnaf, program yang menerima dana paling besar adalah program kemanusiaan, kemudian program kesehatan.
2013	<i>Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan (Zakat As An Instrument For Poverty And Inequality Reduction).</i>	Firmansyah	Regresi dan Moderasi	<i>Zakat, Pengentasan Kemiskinan, Kesenjangan Pendapatan</i>	Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memberi dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Ini membuktikan bahwa zakat yang dikelola dengan baik oleh institusi amil yang amanah dan professional,
2015	<i>Politik Hukum Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen</i>	Sri Kusriah	Metode regresi linier	<i>Pengelolaan Zakat, Penanggulanga</i>	Prospek politik hukum pengelolaan

	<i>Penanggulangan Kemiskinan (Study Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Provinsi Jawa Tengah)</i>		berganda dan uji interaksi	<i>n Kemiskinan</i>	zakat, dalam hal kebijakan implementasinya harus menempatkan negara sebagai motivator, fasilitas dan pelopor dalam pembayaran zakat, melalui BAZNAS dan LAS dengan demikian diharapkan penerimaan zakat semakin meningkat, sehingga zakat dapat digunakan sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan
2015	<i>Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional).</i>	Citra Pratama	MRA	<i>Peran Zakat, Penanggulangan Kemiskinan</i>	meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif.
2017	<i>Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Asean-4 (Studi Pada 4 Negara Asean)</i>	Ahmad Syaifullah dan Nazarudin M	SEM, Moderasi	<i>Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Bruto, Tingkat Kemiskinan</i>	bahwa adanya kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan di ASEAN-4 pada kurun waktu 2005-2014
2017	<i>Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus</i>	Ihwan Wahid Minu	Metode regresi linier berganda dan uji interaksi	<i>Peranan Zakat, Penanggulangan kemiskinan</i>	Dalam usaha mengentaskan kemiskinan melalui zakat, BAZNAS (Badan Amil Zakat

	<i>Baznas Kota Makassar</i>				Nasional) Kota Makassar secara umum memiliki dua bentuk program yaitu bantuan dana konsumtif dan bantuan dana produktif
2018	<i>Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia,</i>	Holilur Rahman	Metode regresi linier berganda dan uji interaksi	<i>Regulasi Zakat, Kewenangan Amil Zakat</i>	Negara berperan penting dalam menjaga harta dan memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan kewenangan pengelolaan zakat melalui regulasi zakat tentang kewenangan amil dalam pengumpulan zakat